

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa sekarang ini. Sektor ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa, dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memajukan bidang pariwisata yaitu dengan membuat perencanaan dan berbagai kebijakan, salah satu kebijakannya yaitu dengan menggali, menginventarisir dan memajukan setiap obyek wisata yang ada sebagai daya tarik bagi wisatawan. Bidang pariwisata mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara pemungutan retribusi obyek wisata.

Tingkat sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Terjadi peralihan fungsi pemerintahan yang cukup signifikan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Daerah otonomi diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat karena dianggap lebih mengetahui keadaan daerahnya. Sehingga bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah dengan segera.

Mahmudi mengemukakan;

**Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah dalam menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadikan perhatian pihak eksekutif, namun legislative pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan”<sup>1</sup>**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pemerintah daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta dari masyarakat. Pelayanan pada masyarakat bisa dikatakan dengan penyediaan sarana dan prasarana umum yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan

---

<sup>1</sup>Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**: Erlangga, Yogyakarta, 2010, hal.18

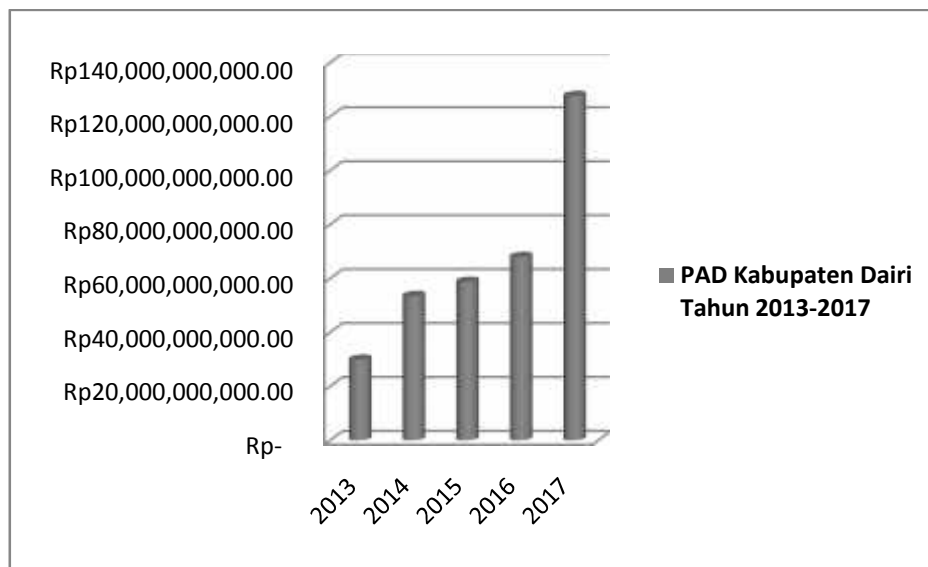
peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Peneliti sebelumnya, Niko Setyhadhi (2009) yang membuat skripsi dengan judul “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Klaten)” dan memperoleh hasil yaitu melalui hasil perhitungan korelasi *product moment* antara pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil tidak signifikan sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah memiliki kesamaan topik namun peneliti sebelumnya meneliti seluruh sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten sedangkan peneliti penulis hanya membatasi penelitian untuk satu objek wisata yang ada di Kabupaten Dairi. Analisis pengolahan data dari peneliti sebelumnya juga memiliki kesamaan yaitu menggunakan Analisis Kontribusi, Analisis Efektivitas Dan Analisis Efisiensi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ini adalah peneliti penulis tidak menggunakan perhitungan korelasi *product moment*, studi kasus dan fokus penelitian yang berbeda. Perhitungan analisis ini dapat dilakukan dengan memperoleh data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DisParBud) Kabupaten Dairi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi.

Setiap daerah tentu akan selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dengan mencari sumber pendapatan baru maupun dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Walaupun pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Dairi dapat dikatakan masih kurang optimal dikarenakan Pendapatan daerah masih didominasi dari dana pendapatan transfer keuangan yang terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi”. Berikut adalah gambar tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi.

**Gambar 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2013-2017**



**Sumber :**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Dairi

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terus

mengalami peningkatan. Berikut adalah realisasi dari penerimaan pada masing-masing komponen dalam PAD Kabupaten Dairi.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kab. Dairi**  
**Tahun 2013 - 2017**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Yang Dipisahkan	Lain-lain yang Sah	PAD	Pertumbuhan
2013	4.792.980.780,05	14.114.120.706,12	6.259.973.736,00	4.766.353.154,91	29.933.428.377,08	-
2014	7.339.512.429,00	31.451.127.038,23	4.182.151.408,00	10.553.063.256,00	53.525.854.131,23	78,81%
2015	7.715.031.033,50	27.834.589.423,23	7.026.750.893,00	16.215.477.171,48	58.791.848.521,21	9,83%
2016	8.654.027.559,70	10.290.370.228,00	10.029.770.339,00	39.029.073.633,64	68.003.241.760,34	15,66%
2017	11.481.804.235,24	8.750.299.568,50	10.779.522.587,00	96.698.596.596,14	127.710.222.986,88	87,80%

**Sumber:** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Dairi

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa PAD dari tahun ke tahun terus meningkat dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 87,80% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,83%. Selain itu, realisasi dari penerimaan pada masing-masing komponen PAD Kabupaten Dairi selama 5 (lima) tahun terakhir ini juga cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, berbeda dengan komponen yang lain, realisasi dari penerimaan retribusi daerah cenderung mengalami penurunan berturut-turut dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang

potensial. Sumber-sumber penerimaan PAD yang memberikan sumbangan dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah Retribusi Daerah dari Pendapatan Sektor Pariwisata. Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperkenalkan seni budaya dan hasil kerajinan tangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata dan tidak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Taman Wisata Iman merupakan salah satu objek wisata religius yang menarik untuk dikunjungi, objek wisata ini terdapat di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi. Berikut jumlah kunjungan wisata Taman Wisata Iman (TWI) di Kabupaten Dairi dari tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pengunjung Objek Taman Wisata Iman (TWI)**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pengunjung</b>
2013	93.990
2014	110.155
2015	121.113
2016	126.866
2017	115.193

**Sumber:** Disparbud Kab.Dairi

Tabel 1.2, Menunjukkan perkembangan jumlah wisatawan TWI di Kabupaten Dairi sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 yang cenderung selalu mengalami kenaikan. Hanya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Jumlah pengunjung tahun 2013 berjumlah

83.990 jiwa meningkat sebanyak 31% ditahun 2014 yaitu sebanyak 110.155 jiwa, ditahun 2015 jumlah pengunjung sebanyak 121.113 jiwa meningkat 10% dari tahun 2014, pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 126.866 jiwa meningkat 5% dari tahun 2015 dan pada tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 115.193 jiwa menurun 5%. Penurunan jumlah pengunjung disebabkan karena adanya objek wisata baru yang masih dikelola oleh masyarakat. Sehingga pengunjung lebih memilih untuk mengunjungi objek wisata yang baru. Hal itu berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung objek wisata yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata sesuai peraturan daerah. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Dairi positif. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata, pendapatan Retribusi Daerah seharusnya semakin meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kabupaten Dairi untuk Tahun 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa Retribusi Daerah untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sementara jumlah pengunjung objek wisata TWI pada tahun tersebut cenderung mengalami peningkatan kecuali di tahun 2017 adanya penurunan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Kemungkinan hal ini terjadi disebabkan kontribusi dari komponen Retribusi Daerah lainnya yang mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar kontribusi salah satu sektor pariwisata

Kabupaten Dairi yaitu objek wisata Taman Wisata Iman (TWI) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Kontribusi Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi yang diberikan objek wisata Taman Wisata Iman terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 - 2017?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan retribusi objek wisata TWI pada tahun 2013 - 2017?
3. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan retribusi objek wisata TWI pada tahun 2013 - 2017?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Batas masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi pada tahun 2013-2017.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan objek wisata TWI terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi



2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan retribusi objek wisata TWI Kabupaten Dairi
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan retribusi objek wisata TWI Kabupaten Dairi

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana, juga untuk menambah pengalaman, pengetahuan dalam memperluas wawasan penulis.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Dairi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Dairi
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### Bab 2 : Landasan Teori

Bab ini tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari pemerintah daerah.

### Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Otonomi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut *daerah*, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo

**Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.<sup>2</sup>**

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami, antara lain:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**: ANDI, Yogyakarta, 2004, Hal.59

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah: (1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. (2) Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik. (3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah. (4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakatnya.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

### **2.1.1 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip yang digunakan dalam otonomi daerah adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah sendiri untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan untuk masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

#### **1) Prinsip Otonomi Luas**

Dalam prinsip otonomi luas, kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani semua urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki

oleh suatu daerah beragam jenisnya. Selain itu, daerah juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintah yang diserahkan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan tujuan dari otonomi daerah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **2) Prinsip Otonomi Nyata**

Suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

## **3) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab**

Otonomi dimana dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dari adanya pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, terdapat tiga misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
- 3) Memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan dari peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah Peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah tersebut. Dengan demikian, pada intinya tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Keuangan Daerah**

### **2.2.1 Defenisi Keuangan Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah seluk beluk uang, urusan uang, keadaan uang. Menurut Adisasmita, keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Sementara menurut Deddy dan Dadang Solihin, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## 2.2.2 Sumber Keuangan Daerah

Pendapatan daerah menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

**Keuangan Daerah adalah Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar – menukar, hibah, asuransi, dan/atau pegadaian barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah”<sup>3</sup>.**

Dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas:

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber - sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Erlina Rambe, Omar Sakti, Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Pemendagri No. 64 Tahun 2013**, Cetakan ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hal 109



### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain penerimaan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana darurat merupakan dana bantuan yang berasal dari APBN yang digunakan untuk keperluan mendesak daerah tertentu. Yang dimaksud dengan keperluan mendesak adalah keadaan luar biasa yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan pembiayaan daerah, yaitu bencana alam atau peristiwa lain yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai bencana nasional.

#### **2.2.3 Objek Pengelolaan Keuangan Daerah**

objek pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

##### **1. Sisi penerimaan**

Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan 2 hal yaitu:

- a) Mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD.
- b) Daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, daerah dapat melakukan kemitraan dan privatisasi.

##### **2. Sisi pengeluaran**

Pada sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi penganggaran.

## 2.2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Pengeluaran Daerah

### 1. Akuntabilitas

Prinsip ini berarti bahwa pengeluaran daerah yang dibiayai baik oleh pajak maupun retribusi daerah harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang didalamnya berisi semua hal yang terkait dengan penggunaan dana publik. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua pihak yaitu DPRD dan masyarakat.

### 2. *Value of Money*

Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus bersifat ekonomis, efisien dan efektif.

#### a. Ekonomis

Hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang paling rendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu.

#### b. Efisiensi

Rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*output*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya (*input*) yang terendah.

**c. Efektivitas**

Merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya.

**d. Kejujuran**

Dalam operasional keuangan daerah harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi. Penempatan staf yang jujur dengan didukung sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan.

**e. Transparansi**

Merupakan salah satu bentuk keterbukaan dari pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu.

**f. Pengendalian**

Proses keterbukaan yang dilakukan melalui kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian dapat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu preventif dan refresif.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi.
- 2) Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan.

3) Pertanggungjawaban APBD.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah

### 2.3.1 Defenisi Pendapatan Asli Daeah

Menurut Darwin :

**“Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah”<sup>4</sup>**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar daerah tersebut mampu untuk membayai kebutuhannya sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan

---

<sup>4</sup> Darwin, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, Hal. 67

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pada akhirnya daerah tersebut diharapkan dapat mandiri.

### **2.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang – Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Hasil Daerah yang dipisahkan

#### **1) Hasil Pajak Daerah**

Menurut Marihot Pahala Siahaan:

**Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>5</sup>**

Jenis pajak daerah:

#### **1. Pajak Daerah Tingkat I / Provinsi terdiri dari :**

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

#### **2. Pajak Daerah Tingkat II / Kabupaten terdiri dari:**

---

<sup>5</sup>Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat: Rajawali Pers, Bandung, 2016, Hal 9

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Nukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walle
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan

## **2) Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah terdiri dari :

### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Pelayanan kesehatan
- b) Pelayanan kebersihan dan persampahan
- c) Penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
- d) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Pelayanan parkir tepi jalan umum
- f) Pelayanan pasar
- g) Pelayanan air bersih
- h) Pengujian kendaraan bermotor
- i) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- j) Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah
- k) Pengujian kapal perikanan

Jadi retribusi jasa umum selain berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah juga berfungsi sebagai alat pengatur. Misalnya untuk daerah yang lalu lintasnya padat yang rawan kemacetan dapat dikenakan tarif retribusi parkir yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang arus lalu lintasnya tidak padat.

## **2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Pemakaian kekayaan daerah
- b) Pasar grosir atau pertokoan
- c) Pelayanan terminal

- d) Pelayanan tempat khusus parkir
- e) Pelayanan tempat penitipan anak
- f) Penginapan
- g) Penyedotan kakus
- h) Rumah potong hewan
- i) Tempat pendaratan kapal
- j) Tempat rekreasi dan olahraga
- k) Penyeberangan di atas air
- l) Pengolahan air limbah
- m) Penjualan usaha produksi daerah

### **3) Retribusi Perijinan**

Retribusi Perijinan adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan dan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Adapun jenis-jenis Retribusi Perijinan terdiri dari:

- a) Ijin peruntukan penggunaan tanah
- b) Ijin mendirikan bangunan
- c) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol
- d) Ijin gangguan
- e) Ijin trayek
- f) Ijin pengambilan hasil hutan



### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pembangunan ekonomi daerah serta merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

### 4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah

Hasil usaha lain daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

## 2.4 Pariwisata

Pengertian Pariwisata

**“Banyak pakar dan ahli pariwisata serta organisasi pariwisata yang memberikan batasan atau pengertian dari pariwisata, tetapi untuk menyatukan pandangan (persepsi) masyarakat Indonesia terhadap batasan-batasan pariwisata, maka pemerintah membuat batasan pariwisata yang diwujudkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang - undang No. 10 Tahun 2009 dimana yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah<sup>6</sup>.**

---

<sup>6</sup>Mohammad Ridwan, **Perencanaan Pengembangan Pariwisata: PT.SOFMEDIA**, Medan, 2012, Hal.4

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Sedangkan objek wisata merupakan suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani dan menemukan cinta keindahan alam. Potensi wisata merupakan kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Penggolongan jenis objek wisata adalah sebagai berikut:

- a. Objek wisata budaya
- b. Objek wisata alam
- c. Objek wisata buatan

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 4 dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) Menghapus kemiskinan;
- 4) Mengatasi pengangguran;
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- 6) Memajukan kebudayaan;
- 7) Mengangkat citra bangsa;

- 8) Memupuk rasa cinta tanah air;
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa.

Pada Pasal 5 dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dijelaskan bahwa kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu manfaat antara pariwisata dan pembangunan ekonomi adalah kenyataan bahwa kawasan wisata bersemangat menyediakan lapangan kerja bagi warga daerah itu. Pariwisata membutuhkan banyak jasa untuk mempertahankan industri, misalnya Industri Rumah makan yang memerlukan karyawan untuk melayani pelanggan. Pariwisata juga membantu pendapatan warga setempat dimana warga dapat membuka usaha di objek wisata tersebut misalnya membuka tokoyang menyediakan kebutuhan wisatawan seperti menjual aksesoris khas kebudayaan setempat.

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

## 2.5 Kontribusi Retribusi Pariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau uang iuran. Sedangkan definisi dari retribusi pariwisata yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa serta layanan yang diberikan kepada masyarakat umum di lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata. Berdasarkan definisi tersebut apabila dihubungkan dengan retribusi sektor pariwisata maka kontribusi retribusi pariwisata merupakan sumbangan atau uang iuran yang diperoleh dari retribusi sektor pariwisata.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100%. Untuk perhitungan kontribusi penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan objek wisata}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \cdot 100\%$$

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, apabila kontribusinya tinggi maka akan semakin baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian retribusi pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel2.1**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Kurang dari 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Balitbang-Fisipol UGM

## **2.6 Efektivitas Retribusi Pariwisata**

Menurut Mardiasmo, **“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif”**.<sup>7</sup> sedangkan menurut Mahmudi, **“Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”**<sup>8</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh realisasi yang dihasilkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara apabila dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah maka efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sedangkan apabila

<sup>7</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**: ANDI, Yogyakarta, 2009, hal. 134

<sup>8</sup> Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**: UPP STIM YKPN, 2016, hal. 141

dihubungkan dengan penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman maka efektivitas penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman merupakan perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman. Untuk mengukur efektivitas yaitu menggunakan rumus berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan objek wisata}}{\text{target penerimaan objek wisata}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektifs
= 100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

**Sumber:** Mahmudi, (2016:141)

## 2.7 Efisiensi Retribusi Pariwisata

Efisiensi menggambarkan tentang perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan efektivitas, yaitu rasio perbandingan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan.

Mahmudi mengatakan bahwa :

**“Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien”<sup>9</sup>.**

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya terendah. Untuk mengukur tingkat efisiensi retribusi sektor pariwisata dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{biaya pemungutan retribusi objek wisata}}{\text{realisasi penerimaan retribusi objek wisata}} \times 100\%$$

Secara umum, klasifikasi nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Kurang dari 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
Lebih dari 40%	Tidak Efisien

**Sumber:** Mahmudi, (2016:142)

---

<sup>9</sup>Loc.Cit



## 2.8 PENELITI TERDAHULU

**Tabel 2.4**  
Peneliti Terdahulu

<b>Peneliti Terdahulu</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Niko Setyhadi (2009)	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten)	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dikumentasi. Teknik analissi data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efektivitas, analisis efesiensi serta korelasi <i>product moment</i> . Berdasarkan analisis yang dilakukan pada periode tahun anggaran 2003 – 2007. dapat diketahui rata-rata kontribusi 1,98%, rata-rata efektivitas 101,40 % rata-rata efisiensi 498,19% dan analisis korelasi menunjukkan $r = -0,638$ yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan PAD.

<p>Farikh Zulhuda (2017)</p>	<p>Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Semarang</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara, Obyek penelitian adalah pajak hotel dan pajak daerah tahun 2011-2015. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa perkembangan pajak hotel pada tahun 2011 – 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun 15,6% meskipun pendapatan dari pajak hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi kontribusinya terhadap PAD menunjukkan hasil dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata 4,98% dari tahun 2011-2015, hambatan yang</p>
----------------------------------	--	--

		ditemui adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.
Fajar Nur Hidayat dan Difa Reza Pahlevi (2016)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014	Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisi deskriptif kuantitatif dan jenis data yang digunakan berupa data <i>time series</i> (2010-2014) dan wawancara (berupa kuisisioner dan wawancara mendalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas yang baik dan kurangnya efisien dalam pengelolaan retribusi daerah. Implementasi pemungutan retribusi masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaanya serta masih kurangnya potensi retribusi daerah yang dapat digali dengan baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dan yang diperoleh. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Kontribusi Penerimaan Objek Wisata Taman Wisata Iman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Kontribusi Penerimaan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.115

Sidikalang dan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan SM.Raja No.127 Sidikalang-Dairi.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima pada indra sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Data Kuantitatif berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi dan Laporan Penerimaan objek wisata Taman Wisata Iman yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Menurut Ananta, et al, mengatakan bahwa :

**”Data Sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada”<sup>10</sup>**

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen mengenai Kontribusi pendapatan objek wisata Taman Wisata Iman, Realisasi penerimaan pendapatan objek wisata Taman Wisata Iman, Target penerimaan pendapatan objek wisata Taman Wisata Iman, Biaya pemungutan retribusi objek wisata Taman Wisata Iman dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Data sekunder inilah yang digunakan penulis untuk mengetahui tingkat kontribusi,

---

<sup>10</sup>Ananta.et al.. **Metodologi Penelitian Bisnis**: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 68

tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi objek wisata TWI terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi.

### **3.4 Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.

#### **1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang diukur dengan satuan rupiah dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

#### **2. Efektivitas**

Perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi objek wisata TWI dengan target penerimaan retribusi obyek wisata TWI dalam satuan prosentase. Berikut adalah kriteria penilaian efektivitas:

- a. Diatas 100% : Sangat Efektif
- b. 100% : Efektif
- c. 90% - 99% : Cukup Efektif
- d. 75% - 89% : Kurang Efektif
- e. Dibawah 75% : Tidak Efektif

#### **3. Efisiensi**

Perbandingan antara biaya pemungutan retribusi objek wisata TWIdengan realisasi penerimaan retribusi objek wisata TWIdalam satuan prosentase.

Berikut adalah kriteria penilaian efisiensi:

- a. Kurang dari 10% : Sangat Efisien
- b. 10% - 20% : Efisien
- c. 21% - 30% : Cukup Efisien
- d. 31% - 40% : Kurang Efisien
- e. Lebih dari 40% : Tidak Efisien

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### **1. Study Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui study kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan study kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan pada masalah yang diteliti.
- b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

#### **2. Study Lapangan (*Fiel Research*)**

Suatu cara pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui tingkat Kontribusi Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi.

Studi Lapangan dilakukan dengan cara Dokumentasi. Metode Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melalui pencatatan atau fotocopy data-data yang diperlukan.

Menurut Suharsimi, **“Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”**<sup>11</sup>. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian yang antara lain berupa : gambaran umum Kabupaten Dairi , jumlah pengunjung Taman Wisata Iman dan Penerimaan Objek Wisata Taman Iman dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya di interpretasikan, sehingga dapat memberikan

---

<sup>11</sup> Suharsimi, Arikunto. **Prosedur Penelitian**, Edisi Revisi- Cetakan Empatbelas: Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hal.274



gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti. Menurut Mudrajad Kucoro mengatakan bahwa:

**“Penelitian Deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.”<sup>12</sup>**

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa:

**1. Mengidentifikasi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.**

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi: data target dan realisasi penerimaan retribusi Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI), biaya pemungutan retribusi, dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

**2. Melakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan beberapa rumus.**

**a. Menghitung kontribusi Penerimaan Objek Wisata Taman Wisata Iman(TWI) terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan analisis untuk mengetahui berapa besar Penerimaan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) terhadap PAD di Kabupaten Dairi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Objek Wisata}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
------------	----------

<sup>12</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat, Erlangga, Kaliurang, 2013, Hal. 12

Kurang dari 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

**Sumber:** Sumber: Balitbang-Fisipol UGM

### b. Menghitung Efektifitas Penerimaan Objek Wisata TWI

Untuk menjawab rumusan masalah kedua dilakukan analisis untuk mengetahui keefetifitasan Penerimaan Objek Wisata Taman Wisata Iman (TWI) terhadap PAD di Kabupaten Dairi dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan objek wisata}}{\text{target penerimaan objek wisata}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektifs
= 100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

**Sumber:** Mahmudi, (2016:141)

### c. Menghitung Efisiensi Pemungutan Retribusi Objek Wisata TWI

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{biaya pemungutan retribusi objek wisata}}{\text{realisasi penerimaan retribusi objek wisata}} \times 100\%$$

Secara umum, klasifikasi nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Kurang dari 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
Lebih dari 40%	Tidak Efisien

**Sumber:** Mahmudi, (2016:142)